



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI BARAT PELANGAN TASTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMADDIN
2. Jabatan : KEPALA UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN RINJANI BARAT PELANGAN TASTURA
3. NHK : 224650

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 313.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 232.480.000
2. Tanah Seluas 2704 m2 di KAB / KOTA DOMPU, WARISAN Rp. 81.120.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 313.280.000

1. MOBIL, HYUNDAI MATRIX MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 270.280.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.698.734

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 661.078.734

III. HUTANG Rp. 250.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

411.078.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.